

## Dewan Perwakilan Rakyat Kalimantan Selatan: Persoalan Sampah Terpulang Pada Kesadaran Masyarakat



*Sumber gambar*

<https://kalsel.antaranews.com/berita/386676/dprd-kalsel-persoalan-sampah-terpulang-pada-kesadaran-masyarakat>

Sekretaris Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang juga membidangi lingkungan hidup, H Gusti Abidinsyah berpendapat, persoalan sampah terpulang pada kesadaran masyarakat. “Karena bagaimana pun baiknya teknologi pengelolaan atau penanganan sampah mungkin hasilnya tidak maksimal, tanpa kesadaran partisipasi masyarakat,” ujar Gusti di Banjarmasin, Selasa.

Oleh karena itu, dia mengharapkan peningkatan kesadaran masyarakat di provinsinya seperti melakukan penilaian sampah terlebih dahulu di rumah tangga sebelum membuang ke Tempat Pembuangan Sementara (TPS) ataupun Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Oleh sebab itu, menurut mantan pejabat Kabupaten Banjar Kalsel tersebut, perlu edukasi kepada masyarakat, terutama pada anak-anak kecil bagaimana mengelola/memisah sampah dengan baik.

Wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar itu juga berharap, provinsinya mempunyai pengelolaan sampah yang lebih baik dan representatif lagi.

Pasalnya, seperti TPA "Banjarbakula" dengan luas 15 hektare perkiraan hanya mampu bertahan hingga 10 - 15 tahun atau lebih. Banjarbakula meliputi Kota

Banjarmasin dan Banjarbaru, serta Kabupaten Banjar, Barito Kuala (Batola) dan Kabupaten Tanah Laut (Tala).

“Kita berpikir ke depan tidak cuma mampu bertahan 10-15 tahun. Karenanya perlu yang lebih luas lagi, dan sejak kini kita akan coba mendorong untuk menyiapkan,” demikian Gt Abidinsyah. Rombongan Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang dipimpin Sekretarisnya H Gt Abidinsyah saat kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, 11 September 2023. (ANTARA/HO- Humas Setwan Kalsel.)

Sementara itu Kepala Seksi Pengangkutan Sampah, Bidang Pengurangan dan Penanganan Sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta Rizky Febriyanto berterimakasih atas kunjungan rombongan wakil rakyat dari Kalsel. Ia berharap, DPRD Kalsel dengan pemerintah/DLH setempat harus lebih saling bekerjasama dalam menangani permasalahan sampah.

Menyertai kunjungan kerja (Kunker) ke luar daerah Komisi III, 10 - 12 September 2023 untuk studi komparasi persampahan tersebut DLH Kalsel.

#### **Sumber berita:**

1. <https://kalsel.antaranews.com/berita/386676/dprd-kalsel-persoalan-sampah-terpulang-pada-kesadaran-masyarakat>, 12 September 2023.
2. <https://kalsel.prokal.co/read/news/51025-dprd-evaluasi-tata-kelola-sampah-dlh-banjarmasin.html>, 7 Oktober 2023.

#### **Catatan:**

##### **Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:**

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
  - a. sampah rumah tangga;  
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
  - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan  
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

c. sampah spesifik.

Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))

Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (1));

5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));

- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

**Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:**

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
  - a. pembatasan timbulan sampah;
  - b. daur ulang sampah; dan/atau
  - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
  - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
  - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.(Pasal 11)

- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
  - b. pengumpulan;
  - c. pengangkutan;
  - d. pengolahan; dan
  - e. pemrosesan akhir sampah.

(Pasal 16)